



RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016 - 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Antara Nomor 451 Bengkulu Kode Pos 28751

Telp. (0766) 22224 Fax. (0766) 22401 - 22402 website: bappeda.bengkalis.go.id
e-mail : bappeda@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 15 /BAPPEDA/2017

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (8) pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/I/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya;
- KEDUA : Rincian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Bappeda dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021 yang pagu indikatif;
- KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA diatas digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 06 Februari 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021 yang memuat VISI dan MISI, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan telah dilakukan penyempurnaan.

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi unsur pimpinan, unsur pembantu (sekretariat) dan unsur pelaksana (bidang) dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu, yang diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan perkembangan isu-isu strategis.

Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu ini merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkulu tahun 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu.

Demikian Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran

serta keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mewujudkan Visinya.

Bengkalis, Februari 2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,**



**Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN. MCRP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 005**



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN TENTANG RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis	8
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis	20
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis ..	39

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
	4.1 Visi dan Misi Bappeda	40
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	41
	4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	44
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	48
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SESUAI RPJMD	49
	LAMPIRAN	
BAB VII	PENUTUP	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB II	II-8
2.1 Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2016	20
2.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bengkulu Menurut Jabatan Tahun 2016	21
2.3 Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	21
2.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bengkulu Menurut Pendidikan Pejenjangan Tahun 2015.....	21
2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bengkulu Tahun 2016	22
2.6 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu	25
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu.....	28
BAB III	III-31
3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021	33
3.2 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu	35
3.3 Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda	37
3.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda Berdasarkan Analisis KLHS	38

BAB IV IV-40

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda 42

4.2 Penilaian Analisis SWOT 45

4.3 Formulasi Strategi SWOT 45

4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 47

BAB VI VI-51

6.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda 51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

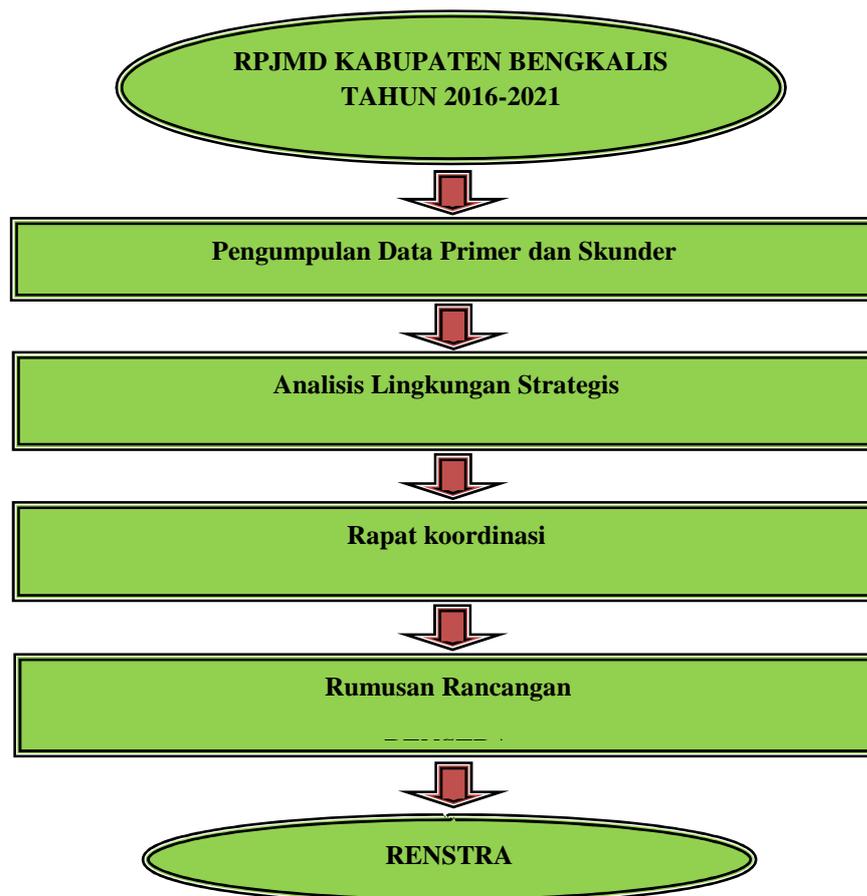
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkalis, yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”.

Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang perencanaan. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/ eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan rancangan Renstra dan penetapannya. Adapun proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk

mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Kabupaten Bengkalis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Menyadari akan hal tersebut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam menyusun Rencana Strategis (**Renstra**) yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk periode 5 (lima) tahunan juga berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 dimaksud untuk menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021.

Adapun yang menjadi tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis yaitu :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. Mengendalikan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Bappeda
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kerja

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Monitoring;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM;
 - b. Sub Bidang Investasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
5. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sub Bidang Agama, Budaya, Pemuda, Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang SDM Aparatur;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda mempunyai tugas:

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012;
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program, monitoring dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata

usaha. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, SDA dan Tata Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di bidang Sarana dan Prasarana, yang meliputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, SDA dan Tata Ruang;
- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, SDA dan Tata Ruang;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sarana dan Prasarana;

- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Bidang Ekonomi
- Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM, Investasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi melaksanakan fungsi :
- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di Bidang Ekonomi yang meliputi Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM, Investasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM, Investasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi;
 - d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Ekonomi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
- Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasi dan penyusun perencanaan bangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang meliputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang meliputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya;

- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang meliputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya;
- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur

Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur;
- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sumber Daya Daerah Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dibidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa setiap daerah kabupaten/kota diminta untuk segera membentuk Perda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda tersebut yang dijadikan dasar sebagai untuk menetapkan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah yang akan diatur melalui Peraturan Bupati.

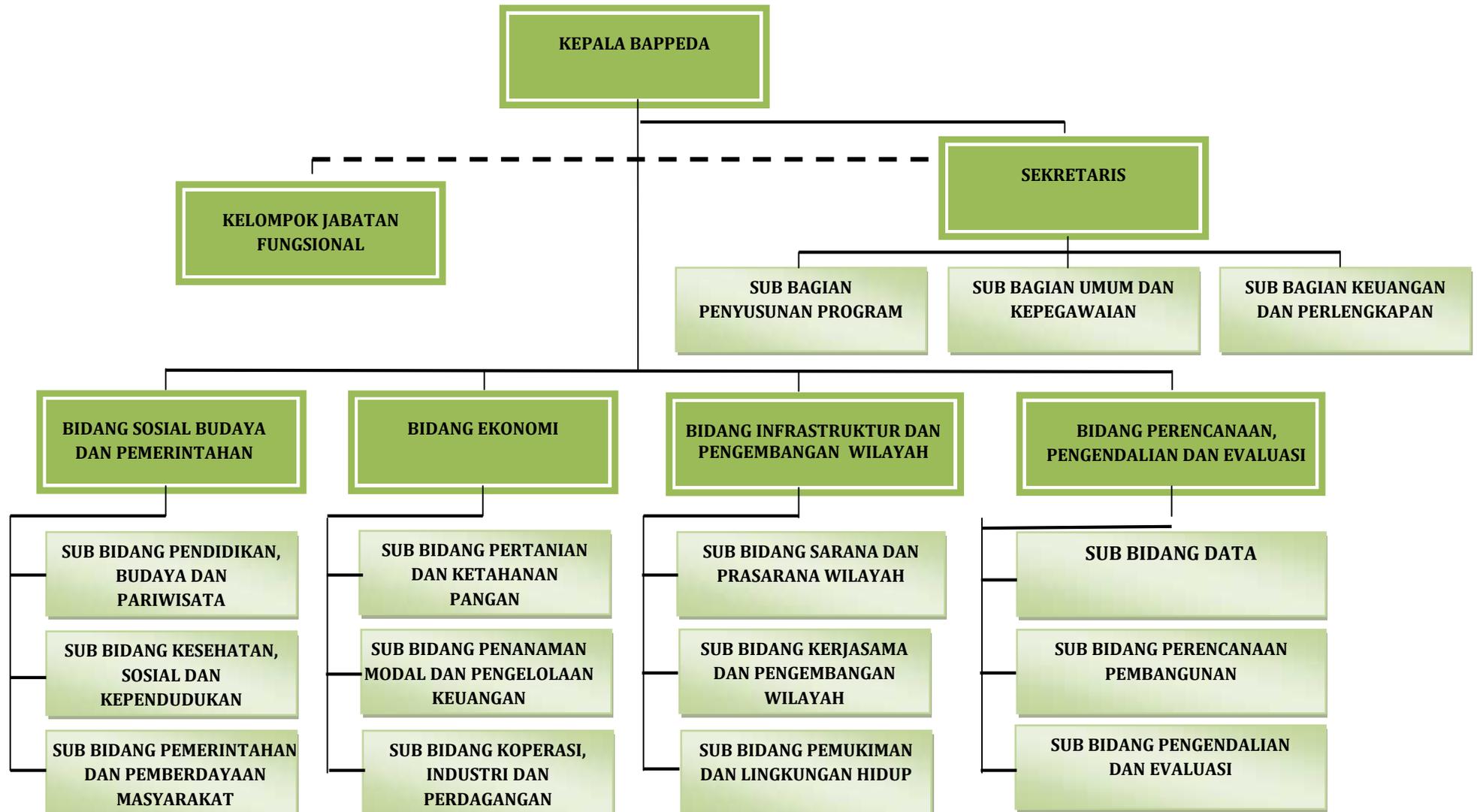
Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Bappeda memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. Sub Bidang Koperasi, Industri dan perdagangan.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :
 - a. Sub Bidang Data;

- b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala Bappeda juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan penyelarasan kesesuaian dokumen Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- g. Pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- h. Pelaksanaan penyelarasan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di Bidang Ekonomi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Ekonomi;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ekonomi;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Ekonomi;
 - d. Pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Ekonomi;
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Ekonomi;
 - f. Pelaksanaan penyelarasan kesesuaian renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Ekonomi;
 - g. Pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Ekonomi;
 - h. Pelaksanaan penyelarasan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Ekonomi;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Pelaksanaan penyesuaian kesesuaian renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Pelaksanaan penyesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - f. Pelaksanaan penyesuaian kesesuaian dokumen renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;

- g. Pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- h. Pelaksanaan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis didukung oleh 70 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh golongan III yang berjumlah 40 orang atau 57,14%, sedangkan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 1 orang atau 1,43%.

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2016

No.	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	%
1	Gol. IV	7	10
2	Gol. III	40	57,14
3	Gol. II	22	31,43
4	Gol. I	1	1,43
Jumlah		70	100

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2016

- b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering

Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 70 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Menurut Jabatan Tahun 2016

No.	Jabatan/ Eselon	Jumlah	%
1	Eselon II	1	1,43
2	Eselon III	4	5,71
3	Eselon IV	11	15,71
4	Staf/ Non Struktural	54	77,14
Jumlah		70	100,00

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2016

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkulu, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 25 orang atau 39,68%.

Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Jabatan/ Eselon	Jumlah	%
1.	Sarjana Starata III (S3)	-	-
2.	Sarjana Starata II (S2)	7	11,11
3.	Sarjana Strata I (S1)	25	39,68
4.	Diploma	2	3,17
5.	SLTA Sederajat	28	44,44
6.	SLTP	1	1,59
Jumlah		63	100,00

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2016

d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 16 orang atau 25,39% dari total pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan.

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Menurut Pendidikan Penjenjangan Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan Penjejjangan	Jumlah	%
1.	Diklatpim IV	7	43,75
2.	Diklatpim III	5	31,25

No.	Tingkat Pendidikan Penjejanan	Jumlah	%
3.	Diklatpim II	4	25
4.	Diklatpim I	-	-
Jumlah		16	100,00

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2015

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Disamping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016

No.	Nama Barang	Jumlah (Dalam Bidang/ Unit/ Buah)	
1.	Tanah	n/a	Ha
2.	Gedung	1	Unit
3	Ruang Rapat	2	Ruangan
4.	Kendaraan Roda 4	12	Unit
5.	Kendaraan Roda 2	48	Unit
6.	GPS	2	Unit
7.	Mesin Tik	3	Buah
8.	Mesin Fotocopy	1	Buah
9.	Lemari Besi	6	Buah
10.	Lemari Kayu	18	Buah
11.	Filling Besi/ Metal	20	Buah
12.	Kursi Roda/tangan	46	Buah
13.	Kursi Sofa	10	Set
14.	Alat Penghancur Kertas	7	Unit
15.	Genset	2	Buah
16.	Televisi	15	Buah
17.	Kulkas	2	Buah
18.	AC	33	Buah
19.	Laptop	40	Buah
20.	Dispenser	1	Buah
21.	Printer	43	Buah
22.	Wireless	3	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah (Dalam Bidang/ Unit/ Buah)	
23.	Microphone	1	Buah
24.	Mic Conference	1	Buah
25.	Stabilisator	2	Buah
26.	Handy Cam	1	Buah
27.	Alat Rumah Tangga	10	Buah
28.	Alat Pemadam	4	Buah
29.	Komputer PC	19	Buah
30.	Server	1	Buah
31.	Router	2	Buah
32.	Camera + Attachment	1	Buah
33.	Proyektor + Attachment	1	Buah
34.	UPS	19	Unit
35.	Peralatan Studio	3	Unit
36.	Off Air TV Monitor	1	Buah
37.	Slide Projector	4	Buah
38.	Telephone (PABX)	5	Buah
39.	Faksimili	5	Buah
40.	CCTV	1	Buah
41.	Lemari Arsip	1	Buah
42.	Vacum Cleaner	3	Buah
43.	Meja Rapat	11	Buah
44.	Peralatan Jaringan	7	Buah
45.	Lemari Buku	1	Buah

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

Selain itu, kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk mendukung kinerja tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda, maka berikut disajikan pencapaian kinerja dan Pendanaan Bappeda selama Tahun 2010 – 2015 masing-masing pada Tabel 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bengkulu

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					
		SKPD Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-					
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor yang Berkualitas	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio perlengkapan kantor terhadap kebutuhan pekerjaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan	40	100	120	140	160	0	2	3	2	3	0	2	2,50	1,43	1,88	
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90	90	90	90	90	75	100	87,97	100	62,50	83,33	111,11	97,74	111,11	69,44	
5.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja	90	90	95	100	100	38	43	40	52	78	42,22	47,78	42,11	52,00	78,00	
6.	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
7.	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
8.	Tersedianya Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
9.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		SKPD Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10.	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
11.	Pertumbuhan PDRB	7,43	7,81	7,92	7,94	8	7,49	7,67	7,87	7,26	N/A	100,81	98,21	99,37	91,44	0
12.	PDRB Per Kapita (Rp)	38.470.758,29	44.731.683,21	52.731.683,21	60.592.763,76	70.591.600,55	35.802.454,37	35.579.582,40	46.164.069,38	46.662.643,21	N/A	93,06	79,54	88,70	77,01	0
13.	Tersedianya Pusat Data	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
14.	Terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bengkulu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
15.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	90	90	90	90	90	73	77	79	84	90	81,11	85,56	87,78	93,33	100,00
16.	Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana	4	2	0	0	0	2	1	0	0	0	50,00	50,00	0	0	0
17.	Ketaatan terhadap RTRW	65	75	85	90	95	68	74	77	82	87	104,62	98,67	90,59	91,11	91,58
18.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Ekonomi	90	90	90	90	90	75	80	83	87	90	83,33	88,89	92,22	96,67	100,00
19.	Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Ekonomi	1	0	2	0	1	1	0	1	0	1	100,00	0	50,00	0	100,00
20.	Laju Inflasi	7,00	7,00	6,50	6,00	5,50	1,04	7,02	6,17	8,71	N/A	14,86	100,29	94,92	145,17	0
21.	Pertumbuhan Ekonomi	7,79	7,76	7,86	7,89	7,97	7,49	7,67	7,72	7,26	N/A	96,15	98,84	98,22	92,02	0

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		SKPD Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Kesra dan Sosial Budaya	90	90	90	90	90	70	75	80	85	90	77,78	83,33	88,89	94,44	100
23.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90	90	90	77	79	83	85	90	85,56	87,78	92,22	94,44	100,00
24.	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencana	-	1	3	2	1	0	0	2	5	3	0	0	66,67	250	300

Sumber : Laporan Kinerja SKPD Tahun 2011-2015

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bengkulu

NO.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.336	2.814	2.869	2.696	3.169	3.336	2.102	2.234	2.138	1.945	2.141	2.646	89,98	79,39	74,52	72,14	67,56	79,32
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.095	1.703	5.260	3.897	3.008	1.804	1.005	1.150	4.623	3.219	2.134	1.336	91,78	67,53	87,89	82,60	70,94	74,06
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	201	653	502	753	0	0	164	484	148	461	0	0	81,59	74,12	29,48	61,22
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	20	0	154	0	0	0	12	0	124	0	0	0	60,00	0	80,52	0	0
5.	Program Pengembangan Data/Informasi	549	1.079	161	0	0	0	544	929	110	0	0	0	99,09	86,10	68,32	0	0	0
6.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	629	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	94,44	0	0	0	0	0
7.	Program Kerja Pembangunan	0	250	513	1.072	1.095	211	0	134	252	871	759	154	0	53,60	49,12	81,25	69,32	72,99
8.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	253	679	687	293	1.353	1.029	197	129	302	141	526	311	77,87	19,00	43,96	48,12	38,88	30,22
9.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	0	0	0	857	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	0	80,16	0	0
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.031	809	1.032	1.620	1.806	1.512	878	556	574	1.347	1.494	1.336	85,16	68,73	55,62	83,15	82,72	88,36
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.494	1.315	3.098	4.821	3.705	2.535	3.975	840	1.982	3.009	2.268	1.104	88,45	63,88	63,98	62,41	61,21	43,55
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.587	1.462	734	1.233	839	904	2.382	1.144	571	958	546	574	92,08	78,25	77,79	77,70	65,08	63,50
13.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.033	273	547	949	889	530	907	125	139	293	316	348	87,80	45,79	25,41	30,87	35,55	65,66
14.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2.497	4.636	2.094	420	591	1.427	2.190	3.288	1.475	185	263	877	87,71	70,92	70,44	44,05	44,50	61,46
15.	Program Perencanaan Tata	919	330	223	0	1.609	793	704	109	0	0	1.275	615	76,61	33,03	0	0	79,24	77,55

NO.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Ruang																		
16.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0	0	598	989	670	73	0	0	552	631	0	71	0	0	92,31	63,80	0	97,26
Total Anggaran		17.423	15.370	18.017	19.654	19.236	14.907	15.478	10.650	12.882	13.894	11.870	9.833	88,84	69,29	71,50	70,69	61,71	65,96

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2010 - 2015

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, maka Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan pelayanan memiliki tantangan dan peluang. Adapun tantangannya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pendukung pelayanan;
2. Belum meratanya kualitas perencanaan bagi aparatur;
3. Belum optimalnya fungsi kerja sistem perencanaan berbasis online/elektronik yang terintegrasi;
4. Belum proporsionalnya usulan yang bersumber dari perencanaan partisipatif, teknokratik dan politis;
5. Belum tersusunnya dengan baik Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan.

Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur Bappeda;
5. Adanya pembinaan baik dari instansi pusat seperti Bappenas dan Ditjen Bangda maupun pemerintah provinsi yakni Bappeda Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perencanaan;
6. Keterbukaan terhadap perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.



BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;

3. Masih rendahnya pemenuhan prasarana pendukung pelayanan;
4. Rendahnya kapasitas dan pemahaman aparatur terkait perencanaan;
5. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
6. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
7. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021, maka yang menjadi visi Kabupaten Bengkalis yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU
DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Penelaahan terhadap visi tersebut adalah berikut:

MODEL NEGERI : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.

MAJU : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintah daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi periode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

MAKMUR : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat didukung oleh Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, yaitu "**Meningkatkan Kapasitas Pembangunan Daerah**". Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah Meningkatkan Keselarasan Pembangunan.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis. Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan	Perencanaan	Bappeda

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Provinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

3.3.1 Rencana Strategis PPN/Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas memiliki visi dan misi guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu **“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis dan Kredibel”**. Visi tersebut dapat dicapai dengan didukung oleh misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah yang sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel; dan
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas untuk mencapai tujuan visi dan misi terdiri atas:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan dan sasaran untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional dan provinsi yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Kabupaten Bengkalis	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(3)
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi	1. Belum terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi antarpemerintah, maupun antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Adanya kebijakan dan kewenangan terkait perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat dan pemerintah provinsi	1. Adanya peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui

<p>pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;</p> <p>2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN;</p> <p>3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP;</p> <p>4. Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya;</p> <p>5. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas</p>	<p>dalam menyusun dokumen rencana daerah;</p> <p>2. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal;</p> <p>3. Keterbatasan data yang valid dan berkualitas</p>	<p>yang masih tumpang tindih;</p> <p>2. Belum optimalnya fungsi kerja sistem perencanaan berbasis online/elektronik yang terintegrasi;</p> <p>3. Masih kurangnya koordinasi dengan <i>stakeholders</i> terkait data</p>	<p>perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja;</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur Bappeda;</p> <p>3. Adanya keinginan bersama antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penyeragaman data</p>
---	---	---	--

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),

Kabupaten Bengkalis dimekarkan setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009.

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 777.393,02 Ha dan dibagi menjadi dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan Lindung seluas 226.240,74 Ha (31,12%) dan Kawasan budidaya seluas 551.152,28 Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional di Kabupaten Bengkalis terdiri dari kawasan lindung nasional dan kawasan andalan Duri – Dumai dan sekitarnya, sedangkan arahan struktur ruang nasional terdiri dari sistem perkotaan nasional dan sistem infrastruktur nasional.

Tabel 3.3
Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda

Telaahan	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(3)
Implikasi RTRW	Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang

Secara umum kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk :

1. Pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;

4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;
5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkalis 2011-2030 secara konseptual ditujukan untuk mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan wilayah, membentuk dan memperkuat jejaring pusat-pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Bengkalis dalam konstelasi regional dan nasional, membentuk dan memperkuat fungsi pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan secara berjenjang, terintegrasi dan terpadu, dan membuka daerah terisolasi dengan mempromosikan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan di wilayah daratan, pesisir dan kepulauan (Rupat dan Bengkalis) sebagai PKLp, PPK dan PPL.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(3)
Pelaksanaan program perencanaan tata ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Layanan informasi penataan ruang	Adanya perbedaan batas wilayah yang diatur dalam Permendagri dan Perda RTRW	Sudah adanya system berbasis Citra dan kajian rencana rinci

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas perencanaan baik melalui dokumen perencanaan maupun SDM Bappeda;
2. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan secara intensif antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan selalu diperbaharui dengan perkembangan terkini;
4. Perlu adanya konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan yang akan datang
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka Bappeda Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas”**

Penjelasan Visi:

1. **Perencanaan Pembangunan** memiliki makna penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien
2. **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan terkait kebutuhan pembangunan daerah terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan dari visi dan misi kepala daerah tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan.

Tugas pokok dan fungsi Bappeda dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, maka untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkulu. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dan rasional dari tujuan yang telah ditetapkan selama periode 2016-2021 dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan aparatur perencana;
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas data pembangunan daerah.

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%	88%	92%	96%	100%	100%	100%
			- Predikat kinerja RKPD	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	sangat tinggi	
			2. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan	- Persentase pemenuhan data Pembangunan	9,15%	9,15%	30%	40%	50%	60%	70%	70%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Nilai akuntabilitas kinerja	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	- Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC	B	BB	BB	A	A	A
				- Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 berdasakan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan Bappeda dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan/ Strength (S)
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappeda setiap tahunnya melalui diklat perencanaan;
 - b. Lingkungan kerja yang memadai;
 - c. Alokasi anggaran yang memadai;
 - d. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan.
2. Kelemahan/ Weakness (W)
 - a. Belum berkompetennya Sumber Daya aparatur dalam menunjang kinerja Bappeda;
 - b. Belum memadai dan akuratnya sistem informasi perencanaan;
 - c. SOP yang belum terlaksana.
3. Peluang/ Opportunity (O)
 - a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah
 - b. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data
 - c. Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah
4. Ancaman/ Threat (T)
 - a. Persaingan perdagangan bebas;
 - b. Produksi minyak dan dana bagi hasil yang berkurang;
 - c. Masih tumpang tindihnya peraturan yang ada;
 - d. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Penilaian Analisa SWOT

Analisa Lingkungan Internal (*Strength & Weakness*)

Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappeda setiap tahunnya	3
	2.	Lingkungan kerja yang memadai	2
	3.	Alokasi anggaran yang memadai	3
	4.	Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam mengambil kebijakan	2
			TOTAL

Kelemahan (<i>Weakness</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Belum berkompetennya Sumber Daya aparatur dalam menunjang kinerja Bappeda	3
	2.	Belum memadai dan akuratnya sistem informasi perencanaan	2
	3.	SOP yang belum terlaksana	1
		TOTAL	6

Analisa Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

Peluang (<i>Opportunity</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah	5
	2.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data	3
	3.	Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah	4
		TOTAL	12

Tantangan (<i>Threat</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Persaingan perdagangan bebas	3
	2.	Produksi minyak dan dana bagi hasil yang berkurang	2
	3.	Masih tumpang tindihnya peraturan yang ada	2
	4.	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	3
		TOTAL	10

Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Berdasarkan tabel penilaian analisa SWOT diatas, maka peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dituangkan dalam bentuk matriks SWOT.

Tabel 4.3
Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNNITY)	TANTANGAN (THREATS)
	FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari instansi pembina perencanaan (Bappenas, Dirjen Bangda dan Bappeda Provinsi) 2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data 3. Adanya pola kerjasama dengan organisasi sejenis perencanaan
KEKUATAN (STRENGTH)	S-O	W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kepala Daerah terhadap tugas dan fungsi Bappeda 2. Sudah adanya aparatur yang memiliki sertifikasi fungsional perencanaan 3. Alokasi anggaran yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sertifikasi fungsional ke jenjang yang lebih tinggi 2. Pengembangan teknologi informasi perencanaan yang terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi perencanaan daerah lintas sektor 2. Pengembangan Diklat untuk kebutuhan perencana
KELEMAHAN (WEAKNESS)	S-T	W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terhimpunnya data perencanaan dari seluruh sektor 2. Belum meratanya kompetensi perencanaan pada Bappeda 3. Belum dimaksimalkan SOP sebagai dasar pijakan perencanaan 4. Masih belum optimalnya pengembangan aplikasi e-planning 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SOP pada tahap pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan penerapan SOP 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat terkait perencanaan pembangunan maupun peraturan yang berkenaan dengan perencanaan

Secara lebih rinci strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai misinya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas			
Misi I : Meningkatkan Kualitas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peningkatan pembangunan dengan memperhatikan rencana prioritas	1. Melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah
		2. Peningkatan pembangunan yang berkualitas	2. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
			3. Melakukan keserasian ketercapaian kebijakan nasional di daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan	1. Peningkatan pemenuhan data pembangunan	1. Melakukan updating data pembangunan secara berkala
			2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan data dukung perencanaan pembangunan
Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas			
Misi II : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1. Peningkatan kualitas pengelolaan	1. Meningkatkan tertib penatausahaan keuangan
			2. Meningkatkan Kualitas rencana kebutuhan, pemeliharaan dan pengelolaan aset
		2. Peningkatan kualitas kinerja	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan internal
			2. Meningkatkan kualitas kompetensi ahli bagi aparatur



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkulu secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II Renstra ini.

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas

- MISI :**
1. Meningkatkan Kualitas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%			
			Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah kegiatan/pertemuan dalam rangka percepatan penyelesaian RTRW	-	-	0	3 Kali	200.000.000	3 Kali	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Pemutakhiran Data RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen basis data RTRW Kabupaten Bengkalis	-	-	0	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen materi teknis RTRW Kabupaten hasil revisi	-	-	0	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah rancangan Perda RTRW dan naskah akademik Ranperda RTRW	-	-	0	-	0	2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	550.000.000	-	0	-	0	-	0
			Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	Frekuensi konsultasi publik revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	-	-	0	-	0	12 Kali	350.000.000	12 Kali	350.000.000	-	0	-	0	-	0
			Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi rapat koordinasi BKPRD Kabupaten Bengkalis	-	-	0	2 Kali	150.000.000										
			Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang	Jumlah dilakukan survey dan monitoring pemanfaatan ruang	-	-	0	15 Kali	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan survey dan monitoring pemanfaatan ruang	-	-	0	-	0	15 Kali	250.000.000								
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%		100%	
			Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	16 Kali	18 Kali	500.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	8 Laporan	8 Laporan	210.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%		100%	
			Sosialisasi RPJMD	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	0	450 Orang	450.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengentrian e-Planning	0	43 Perangkat Daerah	783.101.800	46 Perangkat Daerah	800.000.000	46 Perangkat Daerah	820.000.000	46 Perangkat Daerah	840.500.000	46 Perangkat Daerah	861.000.000	46 Perangkat Daerah	883.000.000	46 Perangkat Daerah	883.000.000
			Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KLHS	-	1 Dokumen	466.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	-	-	0	-	0	1 Dokumen	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen revisi RPJMD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	750.000.000	-	0	-	0
			Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah dokumen rancangan teknokratis RPJMD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	600.000.000	-	0	0
			Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen RPJMD	-	1 Dokumen	1.250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen RPJMD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	1.200.000.000
			Evaluasi RPJPD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen evaluasi RPJPD	-	-	0	1 Dokumen	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Revisi RPJPD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen RPJPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	200.000.000	-	0	-
Forum Perencanaan Daerah	Jumlah pertemuan Bappeda se-Provinsi Riau	-	-	0	-	0	1 Kali	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%		100%				

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/ program Bidang Ekonomi	20 Kali	20 Kali	400.000.000	20 Kali	400.000.000	20 Kali	400.000.000	20 Kali	400.000.000	20 Kali	400.000.000	20 Kali	400.000.000
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	8 Laporan	8 Laporan	271.000.000	11 Laporan	300.000.000								
			Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	-	-	0	1 Rekomendasi	150.000.000	3 Rekomendasi	400.000.000	5 Rekomendasi	405.000.000	5 Rekomendasi	410.000.000	5 Rekomendasi	415.000.000
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	20 Kali	20 Kali	399.800.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	-	-	0	20 Kali	350.000.000								
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	8 Laporan	8 Laporan	181.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	-	-	0	8 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana	16 Kali	20 Kali	390.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	0	20 Kali	400.000.000	20 Kali	450.000.000						
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	8 Laporan	8 Laporan	222.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	-	-	0	8 Laporan	250.000.000	11 Laporan	300.000.000						
			Fasilitasi Program Bidang Keciaptakaryaan	Jumlah fasilitasi dan sinkronisasi program per tahun	3 Kali/ 1 Laporan	3 Kali/ 1 Laporan	209.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD	85%	90%		95%		98%		100%		100%		100%	
			Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang	Jumlah dilakukan survey dan monitoring pemanfaatan ruang	12 Kali	15 Kali	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Sosialisasi RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	0	-	0	-	0	450 Orang	550.000.000	-	0	-	0
			Pendampinga Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	Persentase penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	60%	100%	209.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		2.	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%		88%		92%		96%		100%		100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	5 Dokumen	158.000.000	3 Dokumen	161.000.000	3 Dokumen	165.000.000	3 Dokumen	170.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%		88%		92%		96%		100%		100%	
			Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pansimas	88 Orang	90 Orang	450.000.000	90 Orang	450.000.000	90 Orang	450.000.000	90 Orang	470.000.000	90 Orang	480.000.000	90 Orang	485.000.000
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah pertemuan pokja PPSP	6 Kali	7 Kali	300.000.000	7 Kali	300.000.000	7 Kali	305.000.000	7 Kali	310.000.000	7 Kali	315.000.000	7 Kali	320.000.000
			Koordinasi Program Pengulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan Pokja PKP	-	-	0	5 Kali	200.000.000	5 Kali	200.000.000	5 Kali	205.000.000	5 Kali	210.000.000	5 Kali	215.000.000
			Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan setiap tahun	-	-	0	7 Kali	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%		88%		92%		96%		100%		100%	
			Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	5 Kali	6 Kali	726.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%		88%		92%		96%		100%		100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	-	-	0	3 Dokumen	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	
			Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Pasca MDG's	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan pembangunan	3 kali/ 1 Dokumen	3 kali/ 1 Dokumen	215.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra	-	1 Dokumen	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	
			Review Renstra SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan review terhadap dokumen renstra	-	-	0	-	0	47 SKPD	320.000.000	-	0	-	0	-	
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%		88%		92%		96%		100%		100%	
			Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah	Frekuensi dilakukannya pertemuan perumusan/ sinkronisasi/ pelaporan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi	-	-	0	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	200.000.000	-	0	-	0	-	
			Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	-	-	0	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	169.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	167.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	173.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%		88%		92%		96%		100%		100%	
			Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Jumlah pertemuan/ koordinasi pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals)	-	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	150.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	165.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	165.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	167.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	
			Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	-	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	155.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	167.000.000	-	0	-	0	-	
			Koordinasi Penyediaan Kegiatan Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat	Jumlah pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	-	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	
			Forum Kabupaten Sehat	Jumlah pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	-	-	0	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	250.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	255.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	256.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	
			Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	-	-	0	3 Kali	750.000.000	3 Kali	750.000.000	3 Kali	750.000.000	3 Kali	768.000.000	3 Kali	
			Keberlanjutan Pelaksanaan TKPKD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan pengutan kelembagaan	3 Kali/ 1 Laporan	3 Kali/ 1 Laporan	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah	Frekuensi dilakukannya pertemuan perumusan/ sinkronisasi/ pelaporan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi	-	-	0	-	0	-	0	3 Kali/ 1 Laporan	205.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	210.000.000	3 Kali/ 1 Laporan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD	67%	73%		77%		81%		87%		93%		100%	
			Workshop Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	-	56 Orang	367.000.000	-	0	-	0	-	0	60 Orang	350.000.000	-	
		3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPDP	Rendah	Rendah		Sedang		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPDP	150 Orang	150 Orang	679.000.000	170 Orang	600.000.000	190 Orang	615.000.000	200 Orang	630.000.000	210 Orang	640.000.000	230 Orang	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP Bappeda	-	-	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	0	-	0	-	
			Penyusunan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP	1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	205.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	
			Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah	1 Laporan	1 Laporan	199.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	410.000.000	1 Laporan	420.000.000	1 Laporan	430.000.000	1 Laporan	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/ program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	0	20 Kali	550.000.000	20 Kali	580.000.000	20 Kali	600.000.000	20 Kali	615.000.000	20 Kali	
		2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	4. Persentase pemenuhan data pembangunan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%	
			Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	-	-	0	1 Orang	36.000.000	1 Orang							
			Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%	
			Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku profil Kabupaten Bengkalis	-	-	0	250 Eksamplar	100.000.000	250 Eksamplar	275.000.000	250 Eksamplar	150.000.000	250 Eksamplar	100.000.000	250 Eksamplar	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA												
						2016 (Rp)		2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)		2020 (Rp)		2021 (Rp)		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
			Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	-	-	0	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	
			Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	-	-	0	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	
			Profil Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen profil pembangunan manusia Kabupaten Bengkulu	-	-	0	1 Laporan	550.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Tabel Input-Output Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan data tabel input-output Kabupaten Bengkulu	-	-	0	1 Laporan	500.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkulu	-	-	0	30%	150.000.000	50%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	80%	150.000.000	
			Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	-	-	0	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	
			Pengembangan Sistem dan Informasi Manajemen dan Data Perencanaan	Jumlah sistem yang terintegrasi	-	-	0	-	0	1 Sistem	720.000.000	1 Sistem	720.000.000	1 Sistem	720.000.000	1 Sistem	720.000.000	
			Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%		
			Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	435.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	1 Laporan	665.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%		
			Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	1 Unit	1 Unit	189.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Evaluasi Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah dokumen evaluasi program infrastruktur pedesaan	-	-	0	-	0	1 Dokumen	550.000.000	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Profil dan Sejarah Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen profil dan sejarah pemerintahan daerah	-	-	0	-	0	1 Dokumen	500.000.000	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Kebijakan Strategis Penataan Kota Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kajian yang tersedia	-	-	0	8 Dokumen	750.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Evaluasi Pelaksanaan Urusan dan Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan dan kewenangan daerah	-	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	450.000.000	-	0	-	0	
			Kajian Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian yang tersedia	-	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	500.000.000	-	0	-	0	
			Evaluasi Kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan dan program strategis Kabupaten Bengkulu	-	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	850.000.000	-	0	-	0	
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%		
			Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah data pembangunan ekonomi kerakyatan	1 Laporan	1 Laporan	682.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Inventarisasi Sumber Daya Ekonomi Sektoral Daerah Berbasis Geography Information System (GIS)	Persentase updating data	-	-	0	45%	450.000.000	49%	350.000.000	55%	300.000.000	64%	250.000.000	73%	200.000.000	
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%		
			<i>Social Mapping</i>	Jumlah dokumen pemetaan sosial masyarakat kabupaten yang tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	600.000.000	-	0	
			Analisa Data Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan kajian perencanaan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Laporan/ 150 Eksamplar	500.000.000	
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase pemenuhan data perencanaan	-	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%		
			Kajian Pengembangan Program Wilayah Terpadu (PWT) Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen kajian yang tersedia	-	1 Dokumen	700.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkulu	-	1 Dokumen	600.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Ranperda Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perda Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkulu	-	-	0	1 Dokumen	350.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Sosialisasi Perda Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkulu	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkulu	-	-	0	-	0	11 Kecamatan	600.000.000	-	0	-	0	-	0	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase pemenuhan data perencanaan	9,15%	9,15%		30%		40%		50%		60%		70%		
			Pemetaan Tata Batas Kota 8 Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen kajian yang tersedia	-	1 Dokumen	800.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	5. Nilai akuntabilitas kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC		B		BB		BB		A		A	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	300 Kali	350 Kali	1.309.500.000	350 Kali	935.000.000	350 Kali	937.000.000	350 Kali	939.000.000	350 Kali	940.000.000	350 Kali	941.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC		B		BB		BB		A		A	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	65 Orang	65 Orang	325.500.000	65 Orang	325.000.000								
			Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan air bersih JICA partnership	-	6 Orang	599.000.000	6 Orang	200.000.000	6 Orang	200.000.000	6 Orang	200.000.000	-	0	-	0
			Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-	100 Orang	124.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC		B		BB		BB		A		A	
			Penyusunan Laporan Kinerja	1. Jumlah dokumen laporan kinerja Kabupaten Bengkulu yang tersedia 2. Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen/ 54 Berkas	1 Dokumen/ 54 Berkas	547.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Proram Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC		B		BB		BB		A		A	
			Penyusunan Laporan Kinerja	1. Jumlah dokumen laporan kinerja Kabupaten Bengkulu yang tersedia 2. Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu	-	-	0	1 Dokumen/ 47 Berkas	600.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Pengembangan Data/ Informasi	Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC		B		BB		BB		A		A	
			Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah aplikasi sistem elektronik tata naskah dinas	-	-	0	-	0	1 Sistem	180.000.000	1 Sistem	200.000.000	-	0	-	0
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	C	CC		B		BB		BB		A		A	
			Peningkatan dan Pelatihan Fungsional Perencana	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional perencana	-	20 Orang	1.112.161.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya 2. Jumlah tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya	1. 1.500 Surat/ 3 Orang	1. 1.500 Surat/ dokumen 2. 3 Orang	65.400.000	1. 1.500 Surat/ dokumen 2. 3 Orang	66.000.000	1. 1.500 Surat/ dokumen 2. 3 Orang	66.500.000	1. 1.500 Surat/ dokumen 2. 3 Orang	67.000.000	1. 1.500 Surat/ dokumen 2. 3 Orang	67.500.000	1. 1.500 Surat/ dokumen 2. 3 Orang	68.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	85%	90%	292.000.000	90%	471.600.000	90%	472.000.000	90%	472.500.000	90%	473.000.000	90%	473.500.000
			Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	0	-	0	12 Unit	37.000.000	12 Unit	38.000.000	12 Unit	39.000.000	12 Unit	39.500.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	1. 50 item 2. 9 orang	1. 50 item 2. 9 orang	207.500.000	1. 50 item 2. 9 orang	208.500.000	1. 50 item 2. 9 orang	209.000.000	1. 50 item 2. 9 orang	209.500.000	1. 50 item 2. 9 orang	210.000.000	1. 50 item 2. 9 orang	210.500.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	60 Item	60 Item	563.000.000	60 Item	573.000.000	60 Item	573.500.000	60 Item	574.000.000	60 Item	574.500.000	60 Item	575.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan setiap tahunnya	20 Item	20 Item	98.500.000	20 Item	98.500.000	20 Item	98.500.000	20 Item	98.500.000	20 Item	98.500.000	20 Item	98.500.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	35 Item	35 Item	60.500.000	35 Item	65.500.000	35 Item	67.000.000	35 Item	67.500.000	35 Item	67.500.000	35 Item	68.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	20 Jenis	20 Jenis	75.000.000	20 Jenis	77.000.000	20 Jenis	78.000.000						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkulu setiap tahunnya	1.200 Box	1.400 Box	140.000.000	1.500 Box	145.000.000								
			Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah supir kantor	1 Orang	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000
			Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	-	-	0	65 Media	39.000.000								
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	88%	90%	50.700.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	1	1		1		0		0		0		0	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	-	0	1 Item	83.000.000	6 Item	145.000.000	8 Item	150.000.000	-	0	-	0
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Item	5 Item	386.000.000	6 Item	180.000.000	8 Item	180.000.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	15 Kali	15 Kali	448.500.000	15 Kali	448.500.000	15 Kali	448.500.000	15 Kali	448.500.000	15 Kali	448.500.000	15 Kali	448.500.000
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/ operasional yang terpelihara	12 Unit	12 Unit	481.500.000	12 Unit	495.500.000								

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam 1 tahun	-	-	0	3 Item	150.000.000	3 Item	150.000.000	3 Item	150.000.000	3 Item	150.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	100 Kali	100 Kali	230.000.000	100 Kali	230.000.000	100 Kali	230.000.000	100 Kali	230.000.000	100 Kali	230.000.000		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	0	-	0	2 Unit	1.100.000.000	2 Unit	1.100.000.000	2 Unit	1.100.000.000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	1	1		1		0		0		0			
			Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah alat/ mesin kartu absensi yang disediakan dalam satu tahun	-	-	0	-	0	2 Unit	77.000.000	2 Unit	77.000.000	2 Unit	77.000.000		
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan dalam 1 tahun	-	-	0	-	0	-	0	70 Stel	85.000.000	70 Stel	85.000.000		

Bengkalis, Februari 2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD
			Jumlah program RPJMD
		Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	Jumlah program Renja Perangkat Daerah
			Jumlah program Renstra Perangkat Daerah
Predikat kinerja RKPD	Penilaian atas hasil RKPD Kabupaten Bengkalis		
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data pembangunan	Jumlah data pembangunan yang tersedia
			Jumlah data pembangunan yang terpenuhi

B

**KEPALA BAD
PEMBANG**

**Ir. H. JONDI IND
Pembina Utama
NIP. 19631123 1**

Keterangan

engkalis, Agustus 2017

**SIKIPAN PERENCANAAN
KAWASAN DAERAH**

DR. BUSTIAN, MCRP

**Si Muda
98903 1 005**



BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bengkulu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu, yaitu:

1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
2. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah
3. Predikat kinerja RKPD
4. Persentase Pemenuhan data Pembangunan
5. Nilai akuntabilitas kinerja
6. Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti

6.2 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari Bappeda yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

6.3 Sasaran

Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Adapun Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada sasaran RPJMD disajikan dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
- Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%	88%	92%	96%	100%	100%	100%
- Predikat kinerja RKPD	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	sangat tinggi



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi BAPPEDA di masa mendatang.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkalis ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”